

BIDANG KAJIAN: HUBUNGAN INTERNASIONAL

LAPORAN PENELITIAN



ISU COVID 19 DALAM KONTEKS *HUMAN SECURITY*

PENELITI :

ANNA YULIA HARTATI, S.IP, M.A

NIDN: 0627077601

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : ISU COVID 19 DALAM KONTEKS HUMAN SECURITY

Bidang Penelitian : Hubungan Internasional

Peneliti

- a. Nama Lengkap : Anna Yulia Hartati, S.IP,M.A
- b. NPP : 04.01.1.0050
- c. NIDN : 0627077601
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Jurusan : Isip / Hubungan Internasional
- g. Pusat Penelitian : LP2M UNWAHAS
- h. Alamat Institusi : Universitas Wahid Hasyim Semarang,
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang
50236
- i. Telp/Faks/Email : 024-8505680

Lama Penelitian : 6 (Enam) bulan

Biaya yang diajukan : Rp. 2.000.000

Semarang, 20 Juli 2020

Mengetahui,
Dekan




Agus Riyanto, S.IP, M.Si
NPP. 04.01.1.0046

Peneliti,



Anna Yulia Hartati, S.IP,M.A
NPP. 04.01.1.0050

Mengetahui
Ketua LP2M Unwahas



Dr. Ifada Retno Ekaningrum, S.Ag, M.Ag
NPP. 08.05.1.0124

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan.....	iv
Bab I.Pendahuluan.....	1
Bab II. Metode Penelitian.....	4
Bab III. Hasil dan Pembahasan.....	10
Bab IV. Kesimpulan.....	12
Daftar Pustaka.....	16
Lampiran.....	17

RINGKASAN

Penelitian ini membahas tentang isu covid 19 dalam konteks Human Security. Keberadaan Covid 19 saat ini ini masuk sebagai salah satu issue keamanan dari segi kesehatan didalam kerangka human security issue. Adapun dalam membuat kebijakan penanganan masalah tersebut digunakanlah pendekatan kebijakan human security dengan mempertimbangkan beberapa hal: Evidence Base Approach, merupakan suatu pendekatan berbasis bukti pada agenda nasional dan internasional untuk kebijakan kesehatan dan penelitian kesehatan. Dalam hal ini harus didukung oleh bukti yang sah mulai dari asal mula seseorang terjangkiti, jumlah orang yang berinteraksi dengan korban, jumlah korban dan lain sebagainya. Collaboration Methode, secara khusus bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan tim ketika mereka terlibat dalam pemecahan masalah secara kolaboratif. Bahwa dalam membuat kebijakan terkait masalah kesehatan yang dalam hal ini Covid 19 diperlukan sinergi diantara stakeholder lintas sektoral. Smart-Speed-Solidarity, Smart adalah bersikap, berpikir dan bertindak secara cerdas dalam tindakan yang kita lakukan. Smart terwujud melalui olah rasa melalui intuisi yang tajam, olah rasio melalui kreativitas dan inovasi yang menghasilkan terobosan (breakthrough), dan olah raga melalui aksi-aksi impresif. Speed kecepatan dalam berpikir (fast thinking), kecepatan dalam memutuskan (fast decision), dan kecepatan dalam masuk ke pasar (fast in getting to market) dengan menyingkirkan belitan-belitan birokrasi yang ada. Simplify the complex things. Sederhanakan sesuatu yang rumit agar kita bisa bergerak cepat dan tepat dalam penyampaian kebijakan kepada masyarakat/warga negara. Solidarity adalah kekompakan dan persatuan menuju Indonesia Incorporated yang melibatkan beragam pihak dan stakeholder. Dalam konteks ini dalah tercapainya tujuan yang diharapkan dari sebuah kebijakan utamanya kebijakan dalam menghadapi Covid 19 ini. Governance-Risk-Compliance, merujuk pada strategi yang terkoordinasi untuk mengelola isu-isu, risiko dan kepatuhan terkait dengan suatu kebijakan. Governance secara sederhana merupakan tata kelola yang etis dan efektif oleh level eksekutif dan manajerialnya. Risk, merupakan kemampuan untuk secara efektif dan efisien mengurangi risiko yang dapat menghambat. Compliance, merupakan kepatuhan, kesesuaian dengan persyaratan peraturan untuk operasional, penyimpanan data, dan praktik lainnya dalam kebijakan yang akan diimplementasikan. Saat ini, Covid-19 menjadi ancaman serius bagi populasi umat manusia yang ada di muka bumi karena walaupun ia berdimensi keamanan kesehatan, tetapi berdampak pada dimensi keamanan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam studi-studi keamanan (security studies), Covid-19 dapat dimasukkan sebagai ancaman keamanan non-tradisional, atau lebih spesifiknya ancaman keamanan manusia (human security). Dalam konteks studi keamanan, Covid-19 memerlukan peran serta berbagai aktor nasional dan lintas-negara, negara dan aktor-negara dalam upaya penyelesaiannya. Dalam kategori itu, negara perlu bekerja sama dengan berbagai aktor non-negara (baik sipil maupun militer) untuk memastikan kewaspadaan nasionalnya. Atau bahkan Indonesia juga perlu bekerjasama dengan negara-negara lain, termasuk ASEAN.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

COVID-19 telah dideklarasikan sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020. Sejak kasus pertama pada akhir Desember 2019 teridentifikasi di Wuhan, penyakit ini telah tersebar di 218 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif lebih dari 3.272.701 orang dan korban jiwa mencapai 230.615 ribu orang per 1 Mei 2020. Amerika Serikat menduduki jumlah tertinggi kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 1.076.129 orang. Sekitar sepertiga dari total populasi terdampak (atau 3.251 kasus per 1 juta populasi), dengan kematian tertinggi mencapai 62.380 orang (atau 188 kematian per 1 juta populasi).

Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik. Sejak 2 kasus pertama pada 2 Maret 2020, hanya dalam 9 minggu, per 30 April 2020, Indonesia mencatat 10.118 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dengan total kematian 792 orang dan total sembuh 1.522 orang. Angka ini tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, setiap hari kasus terkonfirmasi bertambah 200-400 orang. Namun ada yang lebih mengkhawatirkan, jumlah tes per 1 juta populasi di Indonesia masih sangat rendah. Per 1 Mei 2020 Indonesia baru mengetes 94.599 orang atau sekitar 346 tes per 1 juta populasi. Angka ini terlampau jauh jika dibandingkan dengan India, Meksiko, Pakistan, Ukraina, atau Cile.[1]

Dari data statistik di atas, terlihat nyata bahwa krisis kesehatan masyarakat ini adalah kedaruratan bagi keselamatan manusia. Tidak hanya itu, krisis ini berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik manusia. 30 juta orang di Amerika Serikat telah mengajukan klaim *unemployment benefit*. International Monetary Fund (IMF) telah memproyeksikan krisis ekonomi akibat COVID-19 ini akan menjadi resesi global terburuk sejak Great Depression 1930-an, sementara Sri Mulyani memperkirakan krisis ekonomi di Indonesia akan menjadi yang terburuk sejak krisis 1998. World Bank memperkirakan sekitar 40-60 juta orang akan menjadi sangat miskin.[2] Menteri Keuangan RI juga memproyeksikan sekitar 2,9 sampai 5,2 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan dan 1,1 sampai 3,78 juta akan hidup di bawah garis kemiskinan.[3] Sekitar 70 juta pekerja informal terancam kehilangan pekerjaan karena perintah *physical*

distancing.^[4] Krisis ini berdampak pada kehidupan, kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan *well-being* manusia. Oleh karena itu, penanganannya pun sebaiknya menggunakan pendekatan keamanan insani (*human security*).

Penelitian ini mengelaborasi Isu COVID-19 menggunakan pendekatan Human Security. Pertama akan dijelaskan secara singkat pendekatannya, kemudian akan diikuti dengan langkah konkrit yang perlu diperhatikan bagi para pemangku kepentingan untuk mengutamakan keselamatan manusia dalam menghadapi pandemi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penanganan covid 19 dalam konteks pendekatan human security?

C. Kerangka Berpikir

Human Security

Istilah keamanan insani diperkenalkan pertama kali dalam UN *Development Report* 1994. Konsep ini mengacu pada pendekatan keamanan yang mengutamakan kesejahteraan, keselamatan, dan martabat manusia. Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai *security referent*, alih-alih negara. Oleh karena itu, tidak heran bahwa pendekatan ini bersifat komprehensif, berupaya untuk melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia dan komunitasnya, mulai dari sosial, politik, ekonomi, lingkungan, sampai kesehatan. Potensi disrupsi multidimensional yang dimunculkan menjadi pertimbangan utama dalam pendekatan alternatif sebagai kritik pendekatan tradisional yang cenderung *state-centric*.

Perhatian terhadap human security diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok, dan individu tertentu. Dan, yang paling mencolok adalah menguatnya gagasan dan upaya human security merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, wabah penyakit, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak azasi manusia, dan sebagainya.

Allan Collins dalam bukunya Human Security mendisikripsikan hal ini sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat diberikan bantuan dari rasa trauma yang

mengganggu dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat. Disebutkan pula bahwa Human security ini memiliki dua pengertian, yakni :

1. keamanan dari ancaman seperti ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan;
2. Merupakan proteksi dari gangguan mendadak dan merugikan dalam pola kehidupan masyarakat baik dalam rumah, pekerjaan ataupun dalam masyarakat.

Dalam Laporan UNDP tentang Pembangunan tahun 1993, PBB kembali menegaskan bahwa “Pengertian mengenai ‘Keamanan’ (Security) pada Abad ke-21 harus difokuskan pada ‘Keamanan Umat Manusia’ (Human Security), tidak hanya ‘keamanan negara’ seperti yang mendominasi periode Perang Dingin”.

Akhirnya berdasarkan Human Development Report 1994 yang dikeluarkan UNDP, dijelaskan secara ringkas human security sebagai : “first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life — whether in homes, in jobs or in communities.” Berdasarkan penekanan itu, UNDP merinci tujuh aspek keamanan manusia yang harus diperhatikan.

Pertama, economic security (bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar). Kedua, food security (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan). Ketiga, health security (kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit). Keempat, environmental security (proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih). Kelima, personal security (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas). Keenam, community security (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya). Ketujuh, political security (perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik).

Salah satu aspek dari human security menurut UNDP yang perlu dicermati saat ini sehubungan mewabahnya virus Covid 19 adalah pada point ke tiga yakni health security dalam arti kemudahan warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit. Di negara kita khususnya dalam menghadapi virus Covid 19 ini perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait health security utamanya kesiapan pemerintah dan negara dalam memberikan layanan kesehatan secara gratis bagi warga

negara baik yang datang memeriksakan diri apalagi bagi warga negara yang telah terjangkiti dengan menyiapkan sarana dan prasarananya. Sedangkan bagi warga negara yang belum terjangkiti pun sudah seharusnya pemerintah telah berupaya untuk memproteksi baik secara kebijakan maupun dengan tindakan.

Keberadaan Covid 19 saat ini ini masuk sebagai salah satu issue keamanan dari segi kesehatan didalam kerangka human security issue. Adapun dalam membuat kebijakan penanganan masalah tersebut digunakanlah pendekatan kebijakan human security dengan mempertimbangkan beberapa hal:

Evidence Base Approach, merupakan suatu pendekatan berbasis bukti pada agenda nasional dan internasional untuk kebijakan kesehatan dan penelitian kesehatan. Dalam hal ini harus didukung oleh bukti yang sah mulai dari asal mula seseorang terjangkiti, jumlah orang yang berinteraksi dengan korban, jumlah korban dan lain sebagainya.

Collaboration Methode, secara khusus bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan tim ketika mereka terlibat dalam pemecahan masalah secara kolaboratif. Bahwa dalam membuat kebijakan terkait masalah kesehatan yang dalam hal ini Covid 19 diperlukan sinergi diantara stakeholder lintas sektoral. Smart-Speed-Solidarity, Smart adalah bersikap, berpikir dan bertindak secara cerdas dalam tindakan yang kita lakukan.

Smart terwujud melalui olah rasa melalui intuisi yang tajam, olah rasio melalui kreativitas dan inovasi yang menghasilkan terobosan (breakthrough), dan olah raga melalui aksi-aksi impresif. Speed kecepatan dalam berpikir (fast thinking), kecepatan dalam memutuskan (fast decision), dan kecepatan dalam masuk ke pasar (fast in getting to market) dengan menyingkirkan belitan-belitan birokrasi yang ada. Simplify the complex things. Sederhanakan sesuatu yang rumit agar kita bisa bergerak cepat dan tepat dalam penyampaian kebijakan kepada masyarakat/warga negara. Solidarity adalah kekompakan dan persatuan menuju Indonesia Incorporated yang melibatkan beragam pihak dan stakeholder. Dalam konteks ini dalah tercapainya tujuan yang diharapkan dari sebuah kebijakan utamanya kebijakan dalam menghadapi Covid 19 ini. Governance-Risk-Compliance, merujuk pada strategi yang terkoordinasi untuk mengelola isu-isu, risiko dan kepatuhan terkait dengan suatu kebijakan. Governance secara sederhana merupakan tata kelola yang etis dan efektif oleh level eksekutif dan manajerialnya. Risk, merupakan kemampuan untuk secara efektif dan efisien mengurangi risiko yang dapat menghambat. Compliance, merupakan

kepatuhan, kesesuaian dengan persyaratan peraturan untuk operasional, penyimpanan data, dan praktik lainnya dalam kebijakan yang akan diimplementasikan.

Istilah keamanan insani diperkenalkan pertama kali dalam UN *Development Report* 1994. Konsep ini mengacu pada pendekatan keamanan yang mengutamakan kesejahteraan, keselamatan, dan martabat manusia. Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai *security referent*, alih-alih negara. Oleh karena itu, tidak heran bahwa pendekatan ini bersifat komprehensif, berupaya untuk melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia dan komunitasnya, mulai dari sosial, politik, ekonomi, lingkungan, sampai kesehatan. Potensi disrupti multidimensional yang dimunculkan menjadi pertimbangan utama dalam pendekatan alternatif sebagai kritik pendekatan tradisional yang cenderung *state-centric*.

Keamanan Kesehatan (*Health Security*)

Kesehatan adalah bagian integral dan kunci dari keamanan insani. Inti keamanan insani adalah perlindungan terhadap kehidupan umat manusia dari ancaman kritis, termasuk penyakit dan disabilitas. Konsep keamanan kesehatan dan keamanan insani adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Isu-isu kesehatan tidak boleh hanya dilihat sebagai “masalah medis”, namun juga masalah keamanan manusianya.

Sebagai kerangka keamanan, keamanan insani memotret betapa pentingnya menanggapi isu-isu kesehatan yang memengaruhi populasi. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia dan meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup adalah elemen penting dalam strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan. Bahkan, jika kita cermati, kesehatan adalah fokus utama dalam *Millennium Development Goals*.

Pada awal tahun 2000, WHO telah memberikan peringatan akan pandemi influenza. Studi yang mereka lakukan telah mengidentifikasi pemicu-pemicu penting dalam peningkatan risiko kesehatan global, seperti perjalanan internasional, urbanisasi, perubahan perilaku seksual, kualitas air, dan udara yang buruk. Pemicu-pemicu ini adalah faktor yang memengaruhi laju peningkatan penyakit menular.[5]

Isu kesehatan menjadi perhatian penting dalam kebijakan keamanan sejak SARS merebak di tahun 2003. Sejak SARS, kawasan Asia Timur, yang umumnya terdampak penyakit menular, mendorong respon-respon koordinatif dan efektif dalam menghadapi

penyakit menular. Krisis ini juga membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk memikirkan kembali posisi kesehatan dalam kebijakan negara, khususnya dalam pembenahan kebijakan regional.[6]

Setelah SARS, pada tahun 2005-2006 muncul H5N1 (*avian influenza* atau flu burung) dan diikuti H1N1 (*swine influenza* atau flu babi) pada 2009-2010. Selain itu, penyakit menular lainnya seperti AIDS, tuberkulosis, dan malaria turut bergabung dalam deretan kerentanan kesehatan masyarakat. Rangkaian penyakit ini menyadarkan bahwa penyakit menular merupakan sumber bahaya bagi keamanan, keselamatan manusia, dan negara itu sendiri. Terlebih ketika sistem kesehatan tidak memadai, kerentanan ini akan memunculkan risiko kematian lebih tinggi.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Cara Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J Moleong, 1989)

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Natsir, 1988). Ditinjau dari segi masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan peneliti, serta tempat dan waktu penelitian yang dilakukan, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian perpustakaan dan dokumenter.

Dalam metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang penanganan Covid 19 dengan pendekatan human security. Dengan data – data yang tersedia peneliti menganalisa tentang keadaan yang terjadi.

B. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian dokumen. Penelitian dokumen dimaksudkan untuk mendeskripsikan berbagai realita yang diteliti. Data diperoleh melalui sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan juga peneliti harus menerima limitasi-limitasi dari data tersebut. Data- data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter, yakni melalui majalah, surat kabar, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan Fisip Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Juga dari beberapa perpustakaan yang terdapat data yang relevan dengan

penelitian ini, seperti perpustakaan wilayah Jawa Tengah dan Perpustakaan dari Universitas di Semarang.

C. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan melalui interpretasi dari dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif – kualitatif. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan. Untuk mengetahui validitas data informasi yang diperoleh diadakan *Cross cheking* data tersebut menunjukkan adanya *reliable* data yang akan dianalisa.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Idealisasi Penanganan COVID-19 dengan Pendekatan Keamanan Insani

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai langkah penanganan COVID-19 dengan pendekatan keamanan insani.[7] *Pertama*, akses terhadap layanan kesehatan. Perawatan harus tersedia bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali, khususnya bagi kelompok rentan dan termarginalkan. Kita melihat biaya *rapid test* dan *swab test* PCR di Indonesia tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Di satu sisi, kelompok miskin yang tinggal di wilayah padat penduduk adalah kelompok paling rentan, namun di sisi lain juga paling tidak bisa mengakses tes. Kemudian, alat pelindung diri (APD) yang tidak memadai bagi tenaga kesehatan sehingga kita menyaksikan kehilangan para “prajurit perang” melawan COVID-19 ini.

Kedua, perumahan dan pangan. Langkah *physical distancing* membuat banyak usaha bangkrut serta terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagian pegawainya. Ketiadaan pemasukan bulanan menyebabkan sebagian dari masyarakat tidak mampu membayar tempat tinggal kemudian memilih untuk pulang kampung, tinggal berdesakan, atau bahkan tidur di pinggir jalan. Pemerintah Indonesia harus menyediakan tempat tinggal bagi kelompok ini, lengkap dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi, seperti yang telah dilakukan pemerintah Malaysia dalam menampung masyarakatnya di fasilitas-fasilitas olahraga. Tidak hanya itu, pemerintah perlu mencegah bertambahnya *homeless people* dengan memberikan keringanan penundaan cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Ketiga, leaving no one behind. Orang dengan disabilitas, perempuan dan anak-anak, lanjut usia (lansia), narapidana, pengungsi, migran, minoritas, dan kelompok adat harus diperhatikan kebutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Misalnya, orang dengan disabilitas dan lansia perlu dibantu oleh keluarga dan komunitasnya dengan jaminan pemerintah dalam menyuplai makanan dan obat-obatan yang diperlukan. Kemudian, perempuan dan anak-anak rentan mengalami peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama *physical distancing*, yang berpotensi menurunkan imun tubuh karena stres berat. Perempuan adalah kelompok pertama yang akan di-PHK karena banyak dari mereka bekerja di sektor informal.

Keempat, informasi dan partisipasi. Informasi-informasi terkait COVID-19 harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Ini artinya informasi harus dapat dipahami dalam berbagai format dan bahasa, termasuk memperhatikan bahasa-bahasa daerah, akses bagi orang berkebutuhan khusus, serta orang-orang dengan akses internet terbatas atau nihil. Lalu, pengumpulan informasi mengenai COVID-19 yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif krusial dalam menjelaskan gambaran situasi atau kondisi sesungguhnya. Tenaga medis dan insan pers harus diperbolehkan memberitakan fakta maupun kritik terhadap pemerintah, tanpa ada larangan atau sensor. Perspektif dan suara perempuan juga perlu diberikan porsi dalam ruang-ruang kepemimpinan di publik.

Kelima, stigmatisasi, *xenophobia*, dan rasisme. Pandemi COVID-19 memunculkan gelombang stigma, diskriminasi, rasisme, dan *xenophobia* terhadap etnis atau kebangsaan tertentu, dalam hal ini kelompok Tionghoa yang dianggap sebagai bagian dari Tiongkok. Dalam penanganannya, baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab moral sebagai bangsa yang plural. Pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat perlu bahu membahu melawan stigma dan rasisme. Hal ini menjadi penting untuk mencegah populasi tertentu menjadi lebih rentan atas kekerasan dan diskriminasi.

Keenam, dampak sosial dan ekonomi. Hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak harus dijamin meskipun banyak sekolah yang tutup dan melakukan pendidikan jarak jauh. Anak perempuan menjadi rentan karena mereka berpotensi terhambat pendidikannya akibat putus sekolah atau membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Kemudian, bagi anak-anak yang tidak memiliki atau keterbatasan akses internet berisiko memperdalam kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, kesehatan mental bagi mereka juga perlu mendapat perlindungan. Lalu, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para tenaga medis dan *frontliners* perlu diberikan APD yang memadai. Tidak boleh ada orang yang dibiarkan bekerja dalam kondisi memprihatinkan tanpa APD karena takut kehilangan pekerjaan. Terakhir, stimulus fiskal dan paket perlindungan sosial bagi kelompok rentan merupakan hal penting untuk mitigasi konsekuensi berat dari pandemi.

Ketujuh, privasi. Monitoring kesehatan termasuk melacak dan mengawasi pergerakan penderita harus sepenuhnya untuk keperluan kesehatan masyarakat dan terbatas dalam durasi serta ruang lingkup yang dibutuhkan. Perlindungan atas privasi

penderita perlu dijamin pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk tujuan selain kesehatan masyarakat. Dalam kasus Indonesia, masih banyak Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), atau kasus positif COVID-19 yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Akibatnya, orang menjadi takut berobat dan berbohong atas riwayat perjalanan dan kesehatannya.

Kedelapan, air bersih, sanitasi, dan kebersihan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah pertahanan pertama menghadapi COVID-19, tetapi masih banyak orang tidak memiliki akses atas air bersih dan sanitasi. Pemerintah bisa melarang pemutusan bagi yang menunggak tagihan air bersih, menyediakan air, sabun, dan *hand sanitizer* gratis di tempat-tempat publik bagi kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin.

B. Covid-19 dan Ancaman Keamanan bagi Manusia

Roland Paris (2001) pemikir Studi Kemanan Manusia berpandangan bahwa keamanan manusia lebih dari sekedar sebatas pada kekuatan militer dan kalah menang dalam perang (traditional security). Oleh karena itu, United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB membagi konsep keamanan manusia menjadi tujuh dimensi, yaitu Kemanan Ekonomi, Keamanan Makanan, Keamanan Kesehatan, Keamanan Lingkungan, Keamanan Personal, Keamanan Komunitas dan Keamanan Politik. Dari ke tujuh dimensi pembagian keamanan manusia di atas, pertanyaannya adalah berada pada sisi manakah sebenarnya Covid-19 ini dalam mengancam manusia ?

Saat ini, Covid-19 menjadi ancaman serius bagi populasi umat manusia yang ada di muka bumi karena walaupun ia berdimensi keamanan kesehatan, tetapi berdampak pada dimensi keamanan lainnya. Sebagai contoh, meskipun China mengalami penurunan jumlah infeksi baru dan kenaikan angka kesembuhan, tetapi negara-negara lain di dunia justru sebaliknya. Pandemi Covid-19 ini menjadi isu ancaman kesehatan lintas batas negara dan menjelma menjadi musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi. Cara memeranginya pun berbeda, tidak seperti memerangi provokasi China coast guard dan kapal-kapal nelayannya di Natuna.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam studi-studi keamanan (security studies), Covid-19 dapat dimasukkan sebagai ancaman keamanan non-tradisional, atau lebih

spesifiknya ancaman keamanan manusia (human security). Dalam konteks studi keamanan, Covid-19 memerlukan peran serta berbagai aktor nasional dan lintas-negara, negara dan aktor-negara dalam upaya penyelesaiannya. Dalam kategori itu, negara perlu bekerja sama dengan berbagai aktor non-negara (baik sipil maupun militer) untuk memastikan kewaspadaan nasionalnya. Atau bahkan Indonesia juga perlu bekerjasama dengan negara-negara lain, termasuk ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN juga perlu diajak bekerja sama dalam pertukaran informasi mengenai perkembangan persebaran virus di negara masing-masing, kebijakan nasional dalam pencegahan dan mekanisme cepat tanggap jika ada indikasi terkena virus Corona. Jika dimungkinkan ASEAN perlu membangun kerangka kerja sama regional mengenai ancaman kesehatan, termasuk Covid-19, di tingkat regional. Dalam konteks itu, penanganan virus Corona tidak lagi hanya menjadi perhatian berbagai negara secara terpisah dalam batas teritori negara masing-masing. Kerja sama antar-negara sangat diperlukan untuk merespon secara cepat ancaman kesehatan lintas-batas negara.

Kerja sama antar-aktor domestik dan antar-negara ini sangat mendesak karena obyek serangan adalah manusia atau warganegara. Ancaman kesehatan dirasakan langsung oleh masyarakat, apalagi yang memiliki mobilitas antar-negara. Mengingat persebaran Covid-19 tergantung pada kontak antar-manusia maka upaya-upaya preventif mengurangi kontak langsung dengan individu terindikasi menjadi salah satu kebijakan urgent dari sebuah negara.

BAB IV

KESIMPULAN

Akhir kata, pandemi akan selalu menjadi kerentanan manusia, namun yang terpenting adalah bagaimana *coping mechanism* kita bisa meminimalisir risiko dan korban jiwa yang akan jatuh. Pendekatan keamanan insani perlu menjadi pendekatan utama dalam menangani krisis kesehatan, alih-alih pendekatan keamanan yang *state-centric*. Konsep human security (keamanan manusia) telah memicu perdebatan di kalangan pengkaji keamanan dan pengambil kebijakan. Sebagian meyakini bahwa konsep itu dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi memberikan jaminan keamanan bagi manusia. Sebagian lagi meragukan keberhasilan implementasi konsep itu karena berbenturan dengan pemahaman sejumlah negara yang masih memandang keamanan secara tradisional. Golongan ini mengaggap bahwa konsep human security tidak lain hanya bentuk baru dari upaya barat dalam rangka menyebarkan nilai dan kepentingan mereka khususnya yang berkaitan dengan liberal dan Hak Asasi Manusia. Para pendukung konsep Human security memperkuat argumentasi mereka dengan mencontohkan keberhasilan negara-negara Barat dalam memenuhi kebutuhan keamanan rakyatnya sebagai bukti positif implementasi pendekatan keamanan baru ini.

Namun demikian oleh beberapa pihak human security dipandang tidak lain merupakan gagasan dan upaya negara-negara Barat dalam bungkus baru untuk menyebarkan nilai-nilai-nilai mereka terutama tentang hak azasi manusia. Paul M. Evans dalam *Human Security and East Asia: In The Beginning*, *Journal of East Asian Studies*, memperkuat gagasan ini yang menyatakan bahwa inti dari human security adalah jawaban yang spesifik mengenai keamanan untuk siapa, dari apa, dan dengan cara apa. Dilain pihak Human security juga menimbulkan tantangan bagi konsepsi tradisional keamanan nasional yang merubah referensi pokok dan memperkenalkan isu-isu yang melampaui strategi keamanan tradisional. Secara filosofi, memunculkan isu-isu mendasar yang berkaitan dengan hati nurani, kewajiban di luar batas, perkembangan, dan legitimasi domestik. Secara politis, konsep ini memunculkan pertanyaan mengenai kedaulatan, intervensi, peran institusi regional dan global, serta hubungan antara negara dan warga negaranya. Negara yang tidak aman pastinya akan

membuat masyarakatnya juga merasa tidak aman. yang menjadi poin disini ialah, negara yang aman tidak selalu berarti masyarakatnya juga merasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Coronavirus Update (Live): 2,867,984 Cases and 200,430 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic. (1609). Diakses May 1, 2020, from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- [2] The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty: Why sub-Saharan Africa might be the region hardest hit. (n.d.). <https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest>
- [3] The Jakarta Post. (2020, April 14). Up to 9 million people to fall into poverty, unemployment as COVID-19 hits: Sri Mulyani. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/14/up-to-9-million-people-to-fall-into-poverty-unemployment-as-covid-19-hits-sri-mulyani.html>
- [4] The Jakarta Post. (2020, April 3). 70 million informal workers most vulnerable during pandemic. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/03/70-million-informal-workers-most-vulnerable-during-pandemic.html>
- [5] Caballero-Anthony, Mely. (2018). *Negotiating Governance on Non-Traditional Security in Southeast Asia and Beyond*. New York: Columbia University Press.
- [6] Caballero-Anthony, Mely. (2005). SARS in Asia: Crisis, Vulnerabilities, and Regional Responses. *Asian Survey*, 45(3), 475-495. doi:10.1525/as.2005.45.3.475
- [7] OHCHR|COVID-19guidance.(n.d.). <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx>